

URGENSI IMPLEMENTASI JURNALISME PATRIOTIK DALAM EKOSISTEM KEWARTAWANAN INDONESIA (TELAAH HISTORIS JURNALISME KEMERDEKAAN INDONESIA)

**Iman Soleh Nurdin¹, Muhammad Salman Abidin², Solihin³,
Muhammad Yunus Maulana⁴**

¹Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, imansnurdin@gmail.com

²Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung,
uinsalman@gmail.com

³Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung,
olinkpiuinbdg@gmail.com,

⁴Politeknik Negeri Bandung, muhammad.yunus@polban.ac.id

Abstract: *The existence of Indonesia as an independent nation is intricately linked to the vital role of journalism worldwide. However, Indonesian journalism currently faces serious challenges, triggering polarization and societal divisions. To address these issues, a new paradigm of patriotic journalism emerges as a proposed solution. This research critically aims to understand the concept of patriotic journalism, focusing on the Indonesian journalistic context. Critical review methodology is employed to provide initial insights into the patriotic journalism paradigm. Findings indicate that patriotic journalism encounters challenges in objectivity, identity conflicts, reporting perspectives, and consistency in goals and practices. Nonetheless, the study offers solutions such as justice implementation, transparency, adapting to core values, engaging in new media interactions, global journalism ethics, and aligning goals with more suitable practices. Although the goals of patriotic journalism align with Indonesia's journalism ecosystem, its advocated practices aren't always congruent. This paper proposes alternative ideas to enhance alignment between patriotic journalism and Indonesia's journalistic ecosystem. In conclusion, implementing patriotic journalism holds significant potential in addressing national issues, particularly concerning societal unity. Suggestions for future research include delving deeper into reporting deemed patriotic using methodologies like content analysis or phenomenology.*

Keyword: *Journalistic Genre, Patriotic Journalism, Indonesia's Journalistic Ecosystem, Critical Review*

Abstrak: *Eksistensi Indonesia sebagai negara merdeka tidak terlepas dari peran penting dunia jurnalisme. Namun, jurnalisme Indonesia saat ini dihadapkan pada tantangan serius yang memicu polarisasi dan perpecahan dalam masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, paradigma baru jurnalisme patriotik muncul sebagai solusi yang diusulkan. Penelitian ini bertujuan untuk secara kritis memahami konsep jurnalisme patriotik, dengan fokus pada konteks kewartawanan Indonesia. Metodologi tinjauan kritis digunakan dalam penelitian ini sebagai upaya dalam memberikan gambaran awal terkait dengan paradigma jurnalisme patriotik. Temuan menunjukkan bahwa jurnalisme patriotik menghadapi tantangan dalam aspek objektivitas, konflik identitas, perspektif pemberitaan, dan konsistensi tujuan dan praktik. Namun, penelitian ini juga menawarkan solusi seperti penerapan keadilan, transparansi, adaptasi pemahaman jiwa korsa, interaksi di media baru, etika jurnalisme global, dan penyelarasan tujuan dengan praktik yang lebih sesuai. Meskipun tujuan*

jurnalisme patriotik sejalan dengan ekosistem kewartawanan Indonesia, praktik yang dianjurkannya tidak selalu sesuai. Tulisan ini memberikan gagasan alternatif untuk meningkatkan keselarasan antara jurnalisme patriotik dan ekosistem kewartawanan di Indonesia. Kesimpulannya, penerapan jurnalisme patriotik memiliki potensi besar dalam menyelesaikan masalah kebangsaan, khususnya terkait dengan kesatuan dan persatuan masyarakat. Saran untuk penelitian masa depan adalah mengkaji lebih dalam pemberitaan yang dianggap memiliki unsur jurnalisme patriotik dengan menggunakan metodologi seperti analisis isi atau fenomenologi.

Kata Kunci: Ragam Jurnalistik, Jurnalisme Patriotik, Ekosistem Kewartawanan Indonesia, Tinjauan Kritis

PENDAHULUAN

Eksistensi Indonesia sebagai negara merdeka dapat terjadi atas sokongan dunia jurnalistik. Para pendiri bangsa, seperti Soekarno, Mohammad Hatta, dan Haji Agus Salim, tidak hanya dikenal sebagai pemimpin politik yang mengnatrakan kemerdekaan Indonesia, tetapi juga sebagai tokoh yang memiliki peran signifikan dalam bidang jurnalistik (Santoso et al., 2023). Mereka menggunakan media massa, seperti surat kabar dan majalah, sebagai sarana untuk menyebarkan gagasan-gagasan nasionalis dan memobilisasi massa dalam mendukung perjuangan kemerdekaan (Dikawati & Sudrajat, 2017). Melalui tulisan-tulisan mereka, para pendiri bangsa mampu menyuarakan aspirasi rakyat, mengkritik kolonialisme, dan membangun identitas nasional yang kuat (Al-Farisi, 2022). Keterlibatan mereka dalam dunia jurnalistik tidak hanya memperkaya wacana politik, tetapi juga memberikan landasan yang kuat bagi perkembangan pers Indonesia pada masa-masa mendatang.

Warisan jurnalistik dari para pendiri bangsa telah membawa banyak manfaat bagi pembangunan Indonesia, meski terdapat permasalahan dalam jurnalisme Indonesia saat ini yang menimbulkan polarisasi dan perpecahan bangsa. Fenomena ini terutama terlihat dalam praktik jurnalisme yang cenderung mencari sensasi (Alam, 2020), serta lebih mementingkan keuntungan komersial dan popularitas daripada integritas dan tanggung jawab sosial (Yesicha & Noviani, 2021).

Selain itu, munculnya media sosial telah memperkuat polarisasi dengan mempercepat dan memperluas sirkulasi informasi yang tidak diverifikasi secara akurat (Kuncoro et al., 2023). Hal ini menyebabkan terjadinya penyebaran berita palsu (hoaks) dan diskusi publik yang tidak konstruktif (Dwiyanti et al., 2023), yang pada gilirannya dapat memperkuat perpecahan di antara berbagai kelompok Masyarakat (Febriansyah & Muksin, 2020). Sehingga, diperlukan upaya bersama untuk memperbaiki kondisi ini agar jurnalisme Indonesia dapat memenuhi peranannya sebagai pilar penting dalam membangun masyarakat yang adil, demokratis, dan harmonis.

Dalam menghadapi problematika polarisasi dan perpecahan bangsa yang terjadi dalam jurnalisme Indonesia, sebuah paradigma baru yang perlu dipertimbangkan adalah jurnalisme patriotik. Jurnalisme patriotik menempatkan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan (Ginosar, 2015). Dengan menerapkan paradigma jurnalisme patriotik, para wartawan dapat memainkan peran aktif dalam memperkuat persatuan dan merawat keragaman bangsa, sambil tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah dan kekuatan lainnya. Selain itu, jurnalisme patriotik juga mengajak masyarakat untuk lebih kritis terhadap informasi yang diterima dan untuk mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau kelompok (Ginosar & Cohen, 2019). Implementasi paradigma jurnalisme patriotik dapat menjadi langkah yang signifikan dalam memperbaiki dampak perpecahan yang telah terjadi di Indonesia, dan membantu membangun fondasi yang lebih kuat bagi persatuan dan kemajuan bangsa.

Penelitian ini bermaksud memahami jurnalisme patriotik secara kritis. Hal ini bertujuan untuk menemukan keselarasan antara konsep jurnalisme patriotik dalam konteks kewartawanan di Indonesia. Penelitian ini dilandaskan atas permasalahan kebangsaan, dimana praktik media saat ini cenderung mengejar sensasi dan keuntungan, sehingga memperluas jarak antar masyarakat sehingga berpotensi memperparah perpecahan di

tengah-tengah masyarakat. Dasar dari penelitian ini adalah pandangan historis terkait dengan fungsi pers dalam kemerdekaan Indonesia. Sehingga, proposisi awal yang dibangun dalam penelitian ini adalah:

Proposisi 1: jurnalisme patriotik selaras dengan ekosistem kewartawanan di Indonesia

Proposisi 2: penerapan jurnalisme patriotik dianggap berpotensi dalam menyelesaikan permasalahan kebangsaan, terkait dengan kesatuan dan persatuan.

TINJUAN PUSTAKA

Salah satu kesulitan dalam membahas jurnalisme patriotik adalah tidak adanya definisi yang disepakati mengenai konsep tersebut. Sebagian besar referensi dalam literatur mengasosiasikan patriotisme dalam jurnalisme dengan kesetiaan seorang jurnalis, atau lembaga jurnalistik, terhadap bangsa, negara, atau kelompok etnisnya (Ginosar, 2015). Dalam konteks ini, Ward (2010) mendefinisikan patriotisme sebagai “kesetiaan kelompok yang melibatkan sikap yang diarahkan, dengan berbagai kekuatan dan cara, pada suatu objek nilai” (Ward, 2010, hal. 44). Umumnya, “objek nilai” adalah bangsa dan/atau negara seseorang, atau seperti yang dikatakan Craige (1997): “Kesetiaan terhadap suatu negara berarti perlawanan terhadap negara lain”.

Aspek yang menyinggung konsep bela negara ini kemudian melahirkan suatu pembahasan yang lebih lanjut terkait perbedaan karakter nasionalistis atau patriotik yang ada dalam jiwa seorang jurnalis. Sehingga, pada perkembangan berikutnya Elliott (2004) membangun definisi yang lebih lanjut terkait dengan perbedaan antara jurnalisme nasionalistis dan patriotik. Jurnalisme patriotik adalah jurnalisme yang peduli terhadap apa yang perlu diketahui oleh masyarakat untuk membuat keputusan yang cerdas demi keberlangsungan hidup mandiri mereka. Adapun, jurnalisme nasionalismencerminkan apa yang ingin dikatakan pihak berwenang atau apa yang ingin didengar warga negara. Ia menyimpulkan bahwa “perbedaan antara jurnalisme patriotik dan jurnalisme nasionalistis adalah perbedaan antara ‘pelaporan’ dan ‘pengulangan’ (Elliott, 2004, hal. 30). Oleh karenanya, jurnalisme nasionalistis dianggap cenderung erat dengan istilah “wacana propaganda” (Nohrstedt et al., 2000). Pada posisi ini, jurnalisme dianggap mengikuti pembingkai kekuatan politik dan tidak memiliki suara independen (Ginosar, 2015).

Sehingga, dapat dibuat suatu sintesis bahwa jurnalisme patriotik terkait dengan suatu praktik kewartawanan yang secara aktif membela dan memberi manfaat kepada masyarakat luas, tanpa terikat dengan niatan dalam mencari keuntungan pribadi.

METODOLOGI PENELITIAN

Tinjauan kritis ialah suatu metodologi untuk memberikan evaluasi kritis dan analisis interpretif pada literatur yang telah ada terkait dengan suatu topik pembahasan untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, kontradiksi, kontroversi, inkonsistensi, dan isu-isu lainnya (Baumeister & Leary, 1997). Jenis kajian pustaka ini berupaya dalam mengidentifikasi sampel literatur-literatur yang dapat memberikan gambaran terkait dengan suatu topik pembahasan, sehingga tidak terpatok dengan ketentuan minimal atau maksimal dari jumlah keseluruhan literatur yang ada (Paré et al., 2015). Berbeda dengan jenis tinjauan lainnya, tinjauan kritis berupaya untuk mengambil catatan reflektif dari penelitian yang telah dilakukan dalam bidang minat tertentu, dan menilai kredibilitasnya dengan menggunakan instrumen penilaian atau metode penafsiran kritis (Paré & Kitsiou, 2017). Dengan cara ini, tinjauan kritis berupaya memberikan informasi konstruktif kepada peneliti lain tentang kelemahan penelitian sebelumnya dan memperkuat pengembangan pengetahuan dengan memberikan fokus dan arahan pada penelitian untuk perbaikan lebih lanjut (Kirkevold, 1997).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan studi kasus yang dilaksanakan oleh Ginosar dan Cohen (2019), Terdapat dua aspek positif dari konsep jurnalisme patriotik, dimana terkait dengan daya tarik emosional dan kognitif. Secara emosional, jurnalisme patriotik sering kali mencerminkan emosi masyarakat, menumbuhkan rasa solidaritas dan empati selama konflik nasional. Secara kognitif, jurnalisme patriotik memberikan kerangka kerja untuk memahami dan membenarkan tindakan suatu negara dalam suatu konflik, sehingga dapat membantu masyarakat memahami situasi yang kompleks.

Berdasarkan aspek positif di atas, jurnalisme patriotik dapat dinilai selaras dengan praktik dalam ekosistem kewartawanan di Indonesia. Hal ini dapat ditemukan dalam pemberitaan terkait krisis pelemahan nilai tukar Rupiah yang terjadi pada saat penyusunan tulisan ini (akhir April 2024). Secara emosional, portal *viva.co.id* menanggapi kegelisahan ini dengan membingkai bahwa negara-negara lain pun *senasib* (Akbar & Prasetya, 2024). Pemilihan kata *senasib* tersebut menggantikan pernyataan Menteri Keuangan terkait dengan “situasi yang sama” terkait dengan implikasi menguatnya nilai tukar dolar dan dampaknya terhadap negara-negara lain.

Pada pemberitaan ini, terindikasi unsur majas meiosis, dimana merupakan amplifikasi secara terbalik (Lausberg & Kennedy, 1998). Meiosis dapat dianggap sebagai kebalikan dari majas hiperbola dimana menggunakan deskripsi yang melebih-lebihkan suatu gagasan. Penggunaan meiosis dalam pemberitaan meredakan konflik terkait dengan persepsi, tanpa mengurangi esensi dari pemberitaan (Jackson, 1995, hal. 49). Sehingga, penggunaan kata *senasib* ini ditemukan dapat memicu solidaritas, sesuai dengan aspek emosional dalam jurnalisme patriotik. Terkait dengan unsur kognitif, ditemukan pemberitaan *Tempo.co* yang menjelaskan implikasi dari melemahnya nilai tukar rupiah. Pemberitaan tersebut menjustifikasikan sikap negara yang belum mengambil langkah apa-apa, karena belum memiliki data yang lengkap tentang peristiwa tersebut (Nugroho, 2024).

Tulisan itu memberikan masukan bagi masyarakat terkait bagaimana dalam menghadapi situasi yang kompleks tersebut. Secara sederhana, pemberitaan *Tempo.co* tersebut memprediksi bahwa akan ada suatu kecenderungan ekspor Indonesia akan semakin besar, karena hasil produksi dinilai lebih murah karena barang-barang tersebut dibeli dengan nilai mata uang yang lebih murah. Masyarakat juga diimbau untuk mengurangi impor barang karena harga barang-barang di luar negeri menjadi mahal karena nilai tukar Rupiah yang melemah.

Tabel 1 menunjukkan secara garis besar permasalahan terkait dengan jurnalisme patriotik. Melalui peninjauan secara kritis, ditemukan berbagai solusi dalam menangani permasalahan yang ada dalam konsep jurnalisme patriotik, sehingga paradigma ini dapat digunakan dalam ekosistem kewartawanan di Indonesia.

Kritik	Kelemahan	Kontradiksi	Kontroversi	Inkonsistensi
Masalah	Objektivitas	Konflik Identitas	Perspektif Pemberitaan	Tujuan dan Praktik
Solusi	Keadilan dan Transparansi	Adaptasi pemahaman jiwa <i>korsa</i> dan interaksi di media baru	Adaptasi etika jurnalisme global dan berperikemanusiaan	Penyelarasan tujuan dengan praktik yang lebih sesuai

Tabel 1

Poin pertama yang patut dikritisi dari gagasan tersebut ialah objektivitas terkait dengan pemberitaan. Jurnalisme patriotik cenderung bergeser dari pakem jurnalistik pada

umumnya, dimana suatu pemberitaan harus netral dan objektif. Jurnalisme patriotik kemudian cenderung dalam melaporkan pemberitaan dari sudut pandang 'sisi mereka' terlepas bahwa pihak tersebut merupakan pelaku atau korban (Ginosar & Cohen, 2019). Hal ini karena jurnalisme patriotik mengedepankan solidaritas dan sikap empati terhadap identitas kesukuan atau kebangsaannya (Schudson, 2003). Objektivitas ini kemudian menjadi titik kelemahan dalam praktik jurnalisme patriotik. Hal ini karena objektivitas dianggap sebagai prasyarat atas kepercayaan antara jurnalis dan audiensinya (Murphy et al., 2006, hal. 325).

Dalam menanggapi kelemahan dari aspek objektivitas ini, diperlukan pemahaman mendasar terkait dengan praktik jurnalisme tradisional. Pada dasarnya, praktik jurnalisme tradisional mengacu kepada apa yang terjadi selama perkembangan pada abad ke-20 di negara-negara Britania, yang kemudian diadopsi oleh negara-negara liberal Barat (Schudson, 2001). Di belahan dunia lain, dan bahkan di negara demokrasi non-Barat, dapat ditemukan berbagai model jurnalistik, beberapa di antaranya jauh dari model objektif (Hallin & Mancini, 2011). Salah satu perbedaan utama yang membedakan model jurnalistik adalah cara masing-masing model menyikapi gagasan 'objektivitas' (Ginosar & Cohen, 2019). Pendekatan objektivitas yang berbeda ini berakar pada budaya, nilai, dan keyakinan yang berbeda.

Hal ini dapat ditemukan dalam perbedaan perspektif antara jurnalis dari Eropa daratan (Jerman, Austria, dan Spanyol) serta negara-negara dengan berbahasa Inggris (Britania, Amerika Serikat, Kanada, dan Austria) dalam penelitian Donsbach (1989). Bagi mereka, objektivitas bukanlah menjadi prioritas lagi, melainkan para jurnalis tersebut mengidam-idamkan untuk menjadi seorang 'jurnalis yang baik', yang mana untuk mencapainya diperlukan suatu upaya yang kuat dalam keterlibatan politik (Donsbach, 1989). Objektivitas tidak lagi dipandang sebagai nilai yang berharga, khususnya oleh para jurnalis yang terhimpun dalam media berbasis daring (Carpenter, 2008; Marchi, 2012). Atas perkembangan tersebut, unsur keadilan dan transparansi kini dianggap sebagai pengganti objektivitas sebagai bagian dari nilai dan praktik profesional jurnalis (Karlsson, 2010). Hal ini selaras dengan nilai Pancasila yang menjunjung tinggi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Poin kedua ialah pembahasan terkait dengan kontradiksi yang terjadi dalam praktik jurnalisme patriotik. Ginosa (2015, hal. 298) menyatakan bahwa adanya konflik antara identitas profesional, nasionalistis, dan humanistis senantiasa bergumul dalam diri jurnalis patriotik. Konflik identitas ini pernah terjadi secara masif pada peristiwa 9/11 yang terjadi di Amerika Serikat. Pada peristiwa tersebut, satu negara terpukul oleh suatu trauma yang sama (Zelizer & Allan, 2003). Pada masa krisis seperti itu, jurnalis menjadi berperilaku patriotik dalam kegiatan jurnalistiknya, dimana didorong oleh insting sebagai manusia dibandingkan dengan pedoman profesional (Ginosar, 2015, hal. 295). Hal ini terjadi bukan karena disengaja (untuk mengerdilkan pihak musuh) namun karena tidak ada pilihan lain selain untuk membangun solidaritas di dalam negara.

Keberpihakan seorang jurnalistik ke dalam suatu identitas dapat dilihat dari dua faktor. Faktor pertama terkait dengan jiwa *korsa*. Seorang jurnalis yang mengikuti rombongan tentara untuk meliput perang akan merasa bahwa mereka sebagai bagian dari kesatuan tersebut, sehingga akan menyajikan liputan pemberitaan yang memperkuat identitas yang sedang disandangnya sebagai bagian dari korps militer. Dalam nuansa yang sama, seorang jurnalis yang melakukan penetrasi ke dalam lingkungan kelompok teroris atau separatis sedikit-demi sedikit akan menyimak dan memerhatikan perilaku dan ideologi mereka, sehingga menimbulkan perasaan simpati terhadap mereka (Ginosar & Cohen, 2019). Faktor kedua terkait dengan perkembangan teknologi dalam ekosistem media. Media baru memungkinkan interaksi yang lebih luas antara jurnalis dan audiensinya. Hal ini memungkinkan jurnalis mengikuti permintaan sebagian besar komentar para pemirsanya (Ginosar & Cohen, 2019). Poin positif terkait dengan ambivalensi identitas ini ialah, profesi jurnalistik tidak terkungkung lagi dengan *agenda setting* dari konglomerasi media. Dengan

adanya jiwa *korsa* dan interaksi dengan pemirsa yang semakin dekat, jurnalis dapat mengedepankan kepentingan masyarakat luas.

Poin ketiga yang patut dikritisi terkait dengan kontroversi perspektif pemberitaan terkait dengan suatu konflik. Terdapat perbedaan antara liputan terkait dengan “perang kita” dan “perang mereka”(Ginosar, 2015, hal. 292); dimana terkait dengan apakah bagian dari identitas seorang jurnalis terlibat atau tidak dalam suatu konflik. Liebes (1992) menyimpulkan bahwa ideologi jurnalistik –yang terdiri dari objektivitas, netralitas, dan keseimbangan, digunakan untuk melaporkan permasalahan orang lain dibandingkan masalah yang sedang dialaminya. Nossek (2004) menemukan bahwa identitas kenegaraan jurnalis atau editor menentukan proses suatu pemberitaan. Jika suatu pemberitaan terkait dengan “perang mereka”, jurnalis tidak akan membuang waktu dan tenaga dalam melakukan peliputan, atau hanya melakukan rilis berita atas dasar kepedulian (Nossek, 2004, hal. 356). Namun, jika terjadi suatu konflik dalam negeri yang didalangi oleh aktor luar, suatu pemberitaan tidak segan mencari kambing hitam dan sosok antagonis dalam pemberitaannya (Nossek, 2004, hal. 360).

Dari Ginossar (2015, hal. 292), kasus pemberitaan seperti contoh di atas masuk dalam kategori jurnalisme patriotik *tribal* (kesukuan). Karakteristik dari kategori ini adalah: (a) jurnalis mengadopsi pembingkai pemerintah/elite terhadap suatu krisis, (b) jurnalis menghindari dalam mengkritik pemerintah selama terjadi suatu krisis, (c) jurnalis menunjukkan solidaritas dengan masyarakat di negerinya, dan (d) jurnalis mengabaikan perspektif lain (“musuh”), terkait dengan narasi dan posisi mereka. Patriotisme berdasarkan kesukuan ini perlu dihindari di era globalisasi ini, yang menuntut pengadopsian sikap sebagai warga dunia dalam merujuk etika jurnalistik (Ward, 2005). Namun, sikap kosmopolitan ini dapat mendatangkan masalah karena seorang jurnalis bisa saja dianggap membela orang lain dibandingkan dengan membela saudaranya sendiri.

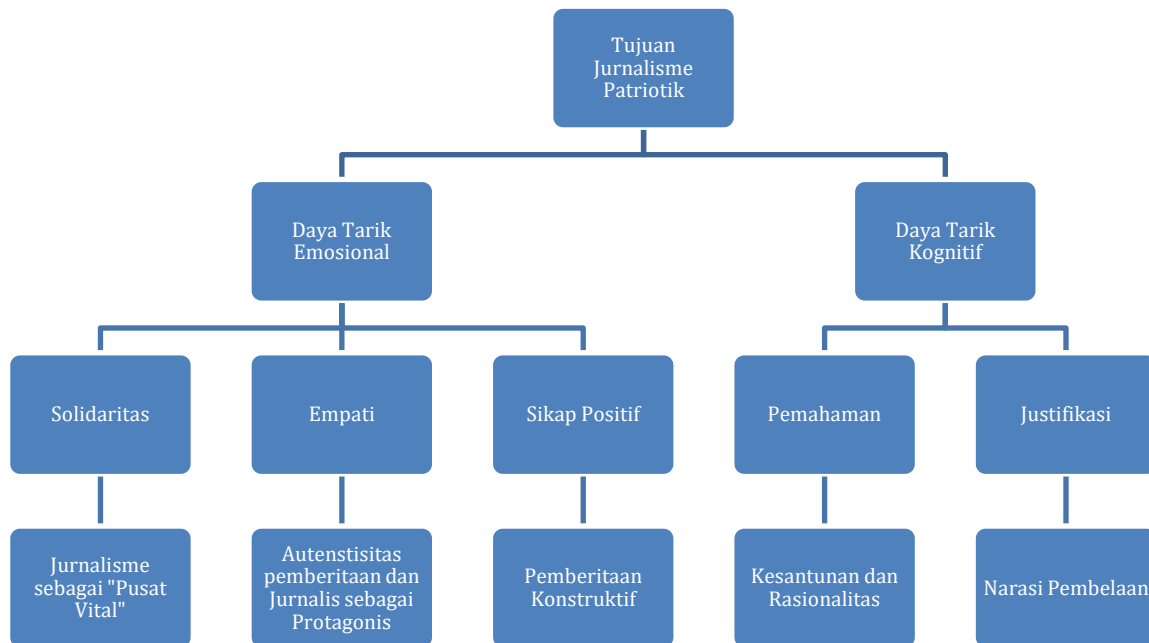
Dalam menanggapi persoalan perspektif tersebut, Ginossar (2015, hal. 293) menawarkan apa yang disebut dengan patriotisme global. Perspektif jurnalisme ini menekankan aspek kemanusiaan dalam pemberitaan yang mengarahkan kepada kebaikan bersama dengan memungkinkan dialog berdasarkan sudut pandang pihak-pihak yang terlibat (Borden, 2005, hal. 31, 41). Dengan mengadopsi sudut pandang global ini, seorang jurnalis dapat menjaga kemandirian kritisnya dan secara bersamaan mendorong mereka untuk menjadi warga negara yang bertanggungjawab (Borden, 2005, hal. 42). Patriotisme seperti ini tidak melanggar etika dan norma jurnalisme profesional. Jurnalisme patriotik menjadi nilai tambah dalam ekosistem media karena mengedepankan aspek kemanusiaan dalam peliputan (Ginosar, 2015, hal. 293). Pada dasarnya, kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan falsafah bangsa yang perlu senantiasa dijunjung tinggi.

Poin terakhir yang patut dikritisi ialah inkonsistensi antara tujuan dan praktik dalam jurnalisme patriotik. Tujuan dari jurnalisme patriotik secara emosional adalah membangun solidaritas, empati, dan sikap positif; dan secara kognitif membangun pemahaman dan justifikasi (Ginosar & Cohen, 2019). Adapun, praktik dari jurnalisme patriotik dapat dinilai berlawanan dengan apa yang berupaya dicapainya.

Mengadopsi indikator dari Liebes(1992), Ginossar dan Cohen (2019) menyatakan bahwa dalam upaya merangkai berita agar menarik secara emosional, jurnalisme patriotik menggunakan ekspresi penulisan seperti pengedrilan (menghilangkan kehadiran musuh), sanitasi (tidak meliput darah atau kehancuran), personalitas (penggambaran secara asimetris dari pihak-pihak yang terlibat konflik), mempersetankan (*demonizing*, dimana menggambarkan musuh sebagai setan, jahat, dan bukan manusia), dan mengagungkan (*glorifying*, menekankan kekuatan, kapabilitas, dan moralitas dari ‘kita’). Sementara itu, dalam merangkai berita agar menarik secara kognitif (Liebes, 1992), ekspresi yang digunakan terkait dengan ekualisasi (tidak menyampaikan perbedaan kekuatan kita dengan musuh), dan kontekstualisasi (mengerdikan konteks keseluruhan dari suatu konflik, dan hanya berfokus pada suatu episode saja).

Aspek inkonsistensi ini dapat dinilai tidak selaras dengan urgensi dalam penerapan jurnalisme patriotik dalam ekosistem kewartawanan Indonesia. Adapun, Gambar 1

menawarkan suatu gagasan agar jurnalisme patriotik dapat mampu menyelesaikan permasalahan kebangsaan, terkait dengan kesatuan dan persatuan



Gambar 1.
Tujuan dari jurnalisme patriotik dan alternatif upaya pencapaiannya

Guna mewujudkan jurnalisme patriotik sesuai dengan tujuannya dan menjunjung tinggi kemanusiaan, suatu pendekatan alternatif perlu dikaji guna mencapai tujuan mulia dari jurnalisme patriotik. Berdasarkan sudut pandang global (Borden, 2005), jurnalis patriotik patutnya dapat menunjukkan solidaritas dan simpati menurut nilai-nilai humanistik dibandingkan dengan ideologi nasionalistis atau etnis (Ginosar & Konovalov, 2015). Jurnalisme ialah "pusat vital" (Schlesinger, 2014) yang merupakan jejaring orang-orang yang condong ke arah demokrasi meskipun tidak memiliki ideologi atau gagasan politik, namun percaya akan perlunya perbaikan di tengah masyarakat setelah suatu kejadian radikal.

Hal ini dapat diwujudkan dengan menolak respons dari para aktor sayap kiri dan kanan, dan mencari konsensus terkait dengan suatu nilai inti (Luengo & Ihlebæk, 2019, hal. 287). Pada dasarnya, jurnalisme ialah suatu institusi komunikasi yang sangat penting dalam lingkup sipil dalam membangun pemahaman di masyarakat. Sehingga, kinerja media memainkan fungsi yang penting dalam memicu perasaan solidaritas bersama dan konsensus sebagai bentuk pertahanan dari tindakan radikal biadab dan polarisasi dalam masyarakat sipil (Luengo & Ihlebæk, 2019, hal. 296). Posisi media sebagai "pusat vital" dapat menengahi ideologi dari ujung spektrum yang berbeda, sehingga mewujudkan masyarakat yang inklusif dan solid (hal. 297). Dengan menjadi penengah dalam konflik, kesatuan bangsa dapat diupayakan karena jurnalisme digunakan sebagai wadah yang mempertemukan pihak-pihak yang berselisih.

Pendekatan humanistik senantiasa menjadi kunci dalam mewujudkan jurnalisme patriotik yang ideal, terutama dalam menumbuhkan empati. Jurnalisme tradisional menempatkan persoalan sosial/moral/struktural di muka berita, namun jurnalisme baru yang berlandaskan pagelaran (*performance based journalism*) memandang suatu permasalahan melalui cerita individu, aksi, drama, atau perpaduan dari ketiganya. Ketika pemirsa ditempatkan sebagai saksi dari suatu cerita manusia, beragam perasaan yang merangsang muncul, termasuk empati (Liebes & Kampf, 2009, hal. 243). Jurnalis sebagai

“penyelenggara pagelaran” berupaya dalam menghadirkan autentisitas dalam pemberitaan. Namun, autentisitas dalam pemberitaan dapat dianggap suatu paradoks (Liebes, 2001). Autentisitas terkait dengan perilaku jujur, spontan dan tidak direncanakan, sehingga para pemirsa percaya bahwa ia sedang berhadapan dengan orang asli di depan layar.

Hal ini menjadi paradoks karena suatu pemberitaan setidaknya mengalami proses pengeditan, sehingga dapat melunturkan kadar autentisitas dalam beberapa derajat. Oleh karenanya, jurnalis kini dituntut untuk berperan sebagai protagonis dalam pemberitaan. Sehingga, jurnalis patriotik yang mumpuni harus mampu dalam berbicara daripada menulis, berimprovisasi daripada mengeja, dan dapat menangis saat melihat bayi yang terluka daripada menganalisis suatu kondisi politik (Liebes & Kampf, 2009, hal. 243). Dengan autentisitas pemberitaan, masyarakat dapat memahami kondisi pemberitaan yang sebenarnya. Wartawan sebagai protagonis yang otentik dapat menjadi sosok yang dipercaya oleh masyarakat karena mengutamakan kejujuran dan diidolakan karena sikap kesatrianya dalam bertugas.

Pandangan audiensi terkait suatu isu dalam pemberitaan ialah subjektif, sehingga wartawan tidak dapat memaksakan agar pemirsa beritanya senantiasa ditanggapi secara positif. Oleh karenanya, solusi yang ditawarkan guna memicu sikap positif dalam kerangka jurnalisme patriotik ialah pemberitaan konstruktif. Pemberitaan konstruktif menjunjung tinggi nilai-nilai dari jurnalisme profesional dan menyuburkan jurnalisme jenis baru yang berorientasi publik, solusi, masa depan, dan tindakan (Hermans & Drok, 2018). Penyertaan elemen konstruktif dalam pemberitaan dapat meningkatkan emosi positif dan mengurangi emosi negatif dalam pemberitaan (Curry & Hammonds, 2014). Lebih lanjut, dengan menawarkan solusi dalam pemberitaan, pemirsa akan lebih paham tentang topik yang sedang dibahas (McIntyre, 2015), serta menginspirasi masyarakat untuk lebih terlibat (Kleemans et al., 2017). Dengan pemberitaan yang membangun, kesatuan dan persatuan di Indonesia dapat terwujud karena dapat mengundang seluruh unsur bangsa dalam menyelesaikan suatu permasalahan.

Argumentasi bahwa pemirsa senantiasa subjektif dalam menanggapi pemberitaan kemudian menjadi permasalahan dalam mendorong agar mereka memahami suatu pemberitaan. Pers memiliki misi dalam membangun pemahaman, saling menghormati, dan niatan baik dalam lingkup nasional maupun internasional (Smith, 2017, hal. 240). Powers (2020) memerhatikan bahwa hari ini, di saat ruang redaksi sibuk dalam membahas persoalan keadilan dan persoalan masyarakat lainnya, muncul suatu diskusi terkait kesantunan yang memiliki potensi dalam memberikan manfaat, serta pemahaman dan harmoni di masyarakat. Kesantunan (*civility*) kemudian dianggap sebagai solusi dalam upaya meningkatkan pemahaman audiensi dalam kerangka jurnalisme patriotik. Hal ini karena kesantunan dapat memperluas pemahaman seseorang, terutama pada masa sekarang dimana kita lebih sering terhubung dengan teknologi dan berkomunikasi dari balik layar (Boyd, 2006). Komentar pengguna dalam situs berita memungkinkan diskusi dari suatu topik, sehingga menjadi wadah dalam bermusyawarah (Springer et al., 2015).

Adapun, Wessler (2008) menyatakan bahwa agar dapat menjadi bermakna dan bernilai musyawarah, suatu wacana patutnya rasional (memiliki dasar bukti) dan santun (penyampaian gagasan secara sopan dan penuh rasa hormat). Sehingga, kesopanan dan rasionalitas menjadi kunci dalam menciptakan wacana yang bermusyawarah (Freelon, 2015), sehingga menjadikannya sebagai diskusi politis yang mengutamakan penyelesaian masalah dan menjaga kepentingan masyarakat (Valenzuela et al., 2012). Dalam kesempatan yang bersamaan, kurangnya kesantunan dan rasionalitas ialah dua komplain pemirsa yang paling sering diterima oleh para jurnalis dan editor (Reich, 2011). Pada dasarnya, kesantunan ialah salah satu karakteristik yang menonjol dalam diri bangsa Indonesia. Implementasi nilai-nilai kesantunan yang berpotensi dalam memicu musyawarah dalam masyarakat kemudian dapat mendorong kesatuan dan persatuan bangsa.

Secara teoretis, justifikasi dapat dipengaruhi oleh keyakinan umum terkait dengan hakikat dari suatu norma sosial (Kepplinger & Viererbl, 2021). Justifikasi berbeda dengan dalih (*excuse*). Justifikasi ialah ketika seseorang melakukan sesuatu yang berbahaya, namun tidak dianggap salah dalam konteks yang khusus. Sementara itu, dalih ialah perbuatan yang

salah walaupun dalam konteks yang khusus (Colvin, 1990). Danielson (2023) kemudian mengungkap konsep narasi pembelaan (*exculpatory*). Narasi pembelaan ialah suatu upaya dalam mengonter pertanyaan terkait dengan suatu tindakan dengan menggarisbawahi kebajikan dan keluhuran moral pelakunya (Danielson, 2023, hal. 542). Strategi pembelaan terkait dengan pemosisian suatu masalah ke dalam sikap pelepasan, mitigasi, dan peningkatan karakter. Posisi yang berbeda dapat diambil dalam penyusunan suatu narasi pembelaan, atau perpaduan antara ketiganya (Danielson, 2023, hal. 540). Dengan narasi pembelaan, kepentingan bangsa dapat senantiasa dijustifikasikan. Hal ini menjadikan jurnalisme patriotik sebagai paradigma yang dapat mendorong masyarakat untuk mengesampingkan kepentingan pribadinya, dan menjunjung tinggi tujuan bangsa dan negara.

KESIMPULAN

Jurnalisme patriotik bukanlah suatu paradigma jurnalistik yang tanpa cela, dimana tulisan ini mampu mengidentifikasi dan mengkritisi kelemahan-kelemahan yang ada di dalamnya. Adapun, sejalan dengan proses kritis tersebut, tulisan ini mampu dalam menjadikan jurnalisme patriotik sebagai paradigma yang amat memungkinkan diterapkan dalam konteks ekosistem media di Indonesia. Jurnalisme Patriotik secara historis selaras dengan apa yang telah dilaksanakan oleh para pendiri bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tulisan ini kemudian memperkuat gagasan bahwa jurnalisme patriotik dapat berpotensi dalam menyelesaikan permasalahan kebangsaan, terkait dengan kesatuan dan persatuan. Tugas kita hari ini ialah melanjutkan perjuangan tersebut dengan menerapkan jurnalisme patriotik tidak hanya sebagai upaya dalam mempererat kesatuan bangsa, namun terlibat secara aktif dalam memperkuat eksistensi Indonesia di kancah dunia.

Tulisan ini merupakan upaya dalam menghadirkan konsep jurnalisme patriotik secara komprehensif. Namun, tulisan ini dapat dianggap hanya menyentuh kulit luar dari jurnalisme patriotik. Penelitian pada masa mendatang dapat menggunakan tulisan ini sebagai patokan dalam mengkaji jurnalisme patriotik yang terjadi di Indonesia, dimana kajian terkait ragam jurnalistik ini masih sedikit atau kurang mendalam. Contoh pemberitaan yang digunakan dalam tulisan ini juga masih terbilang sedikit dalam menggambarkan jurnalisme patriotik. Sehingga, penelitian pada masa mendatang diharapkan dapat mengkaji lebih dalam pemberitaan-pemberitaan yang dianggap memiliki unsur jurnalisme patriotik dengan metodologi terkait, seperti analisis isi atau fenomenologi. Secara garis besar, kami para penulis mengundang rekan-rekan sejawat guna mengembangkan jurnalisme patriotik demi terwujudnya ekosistem kewartawanan Indonesia yang lebih maju

UCAPAN TERIMA KASIH

Tulisan ini terwujud atas sumbangsih dari Bapak Budiana Ruslan yang telah memperkenalkan berbagai metode kajian pustaka, salah satunya metode tinjauan kritis yang digunakan dalam penelitian ini. Tidak lupa, kami para penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Iman Rasidi selaku pemilik Kedai Kopi Ikhlas beserta seluruh pegawainya, karena senantiasa memberikan fasilitas ruang diskusi yang nyaman dalam proses penyelesaian tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, R. J., & Prasetya, M. Y. (2024). *Rupiah Melemah, Sri Mulyani Beberkan Mata Uang Negara-negara G20 Kondisinya Senasib*. viva.co.id.

- <https://www.viva.co.id/bisnis/1708963-rupiah-melemah-sri-mulyani-beberkan-mata-uang-negara-negara-g20-kondisinya-senasib?page=1>
- Al-Farisi, L. S. (2022). SOSIALISME ISLAM DI INDONESIA: Melacak Akar Pemikiran dan Aktualisasi Gerakan Politik Islam Hadji Oemar Said Tjokroaminoto. *ASPIRASI*, 12(1), 39–62.
- Alam, S. (2020). Jurnalisme Damai dalam Pembingkaian Berita Rasisme Mahasiswa Papua di Tribunnews.com dan Detik.com. *Jurnal Pewarta Indonesia*, 2(2), 121–136. <https://doi.org/10.25008/jpi.v2i2.33>
- Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1997). Writing Narrative Literature Reviews. *Review of General Psychology*, 1(3), 311–320. <https://doi.org/10.1037/1089-2680.1.3.311>
- Borden, S. L. (2005). Communitarian Journalism and Flag Displays after September 11: An Ethical Critique. *Journal of Communication Inquiry*, 29(1), 30–46. <https://doi.org/10.1177/0196859904270031>
- Boyd, R. (2006). “The Value of Civility?” *Urban Studies*, 43(5–6), 863–878. <https://doi.org/10.1080/00420980600676105>
- Carpenter, S. (2008). How Online Citizen Journalism Publications and Online Newspapers Utilize the Objectivity Standard and Rely on External Sources. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 85(3), 531–548. <https://doi.org/10.1177/107769900808500304>
- Colvin, E. (1990). Exculpatory Defences in Criminal Law. *Oxford Journal of Legal Studies*, 10(3), 381–407. <https://doi.org/10.1093/ojls/10.3.381>
- Craige, B. J. (1997). American patriotism in a global society. In *Choice Reviews Online* (Vol. 34, Nomor 06). State University of New York Press. <https://doi.org/10.5860/choice.34-3559>
- Curry, A. L., & Hammonds, K. H. (2014). The power of solutions journalism. *Solutions Journalism Network*, 7, 1–14.
- Danielson, M. (2023). Disclaiming, Mitigating, and Character Boosting—How Targets of Investigate Journalism Negotiate Guilt, Excuses, Justification, and Morality. *Journalism Studies*, 24(4), 532–551. <https://doi.org/10.1080/1461670X.2023.2173954>
- Dikawati, R., & Sudrajat, A. (2017). Golongan Tua Menggagas Pergerakan Nasional: Pemikiran R.M.T Koesoemo Oetoyo di Bidang Politik Tahun 1908-1942. *AGASTYA: JURNAL SEJARAH DAN PEMBELAJARANNYA*, 7(2), 20. <https://doi.org/10.25273/ajsp.v7i2.1487>
- Donsbach, W. (1989). Journalistikstudenten im internationalen Vergleich. *Publizistik*, 34(4), 408–427. <https://doi.org/10.1007/BF03654189>
- Dwiyanti, D. A., Nurani, I., Alfarizi, M. N., & Hubbah, R. D. (2023). Pengaruh Media Sosial terhadap Partisipasi Politik Warga Negara: Dampak Positif dan Negatif. *ADVANCES in Social Humanities Research*, 1(4), 298–306.
- Elliott, D. (2004). Terrorism, Global Journalism, and the Myth of the Nation State. *Journal of Mass Media Ethics*, 19(1), 29–45. https://doi.org/10.1207/s15327728jmme1901_3
- Febriansyah, & Muksin, N. N. (2020). Fenomena Media Sosial: Antara Hoax, Destruksi Demokrasi, dan Ancaman Disintegrasi Bangsa. *Sebatik*, 24(2), 193–200.
- Freelon, D. (2015). Discourse architecture, ideology, and democratic norms in online political discussion. *New Media & Society*, 17(5), 772–791. <https://doi.org/10.1177/1461444813513259>
- Ginosar, A. (2015). Understanding Patriotic Journalism: Culture, Ideology and Professional Behavior. *Journal of Media Ethics*, 30(4), 289–301. <https://doi.org/10.1080/23736992.2015.1082915>
- Ginosar, A., & Cohen, I. (2019). Patriotic journalism: An appeal to emotion and cognition. *Media, War & Conflict*, 12(1), 3–18. <https://doi.org/10.1177/1750635217710678>
- Ginosar, A., & Konovalov, I. (2015). Patriotism on the internet: Journalists’ behavior and user comments. *Media, War & Conflict*, 8(3), 368–383. <https://doi.org/10.1177/1750635215607813>
- Hallin, D. C., & Mancini, P. (2011). Comparing media systems beyond the western world. In *Comparing Media Systems beyond the Western World*. Cambridge University Press.

- <https://doi.org/10.1017/CBO9781139005098>
- Hermans, L., & Drok, N. (2018). Placing Constructive Journalism in Context. *Journalism Practice*, 12(6), 679–694. <https://doi.org/10.1080/17512786.2018.1470900>
- Jackson, I. (1995). Little Bromides of the Fourth Estate: Playful Meiosis versus Demeaning Relegation in the Public Representation of Childhood. *Journal of Communication Inquiry*, 19(1), 38–52. <https://doi.org/10.1177/019685999501900103>
- Karlsson, M. (2010). RITUALS OF TRANSPARENCY. *Journalism Studies*, 11(4), 535–545. <https://doi.org/10.1080/14616701003638400>
- Kepplinger, H. M., & Viererbl, B. (2021). Borderline journalism: Why do journalists accept and justify questionable practices that establish scandals? A quantitative survey. *Journalism*, 22(3), 650–670. <https://doi.org/10.1177/1464884918801077>
- Kirkevold, M. (1997). Integrative nursing research — an important strategy to further the development of nursing science and nursing practice. *Journal of Advanced Nursing*, 25(5), 977–984. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.1997.1997025977.x>
- Kleemans, M., de Leeuw, R. N. H., Gerritsen, J., & Buijzen, M. (2017). Children’s Responses to Negative News: The Effects of Constructive Reporting in Newspaper Stories for Children. *Journal of Communication*, 67(5), 781–802. <https://doi.org/10.1111/jcom.12324>
- Kuncoro, H. R., Hasanah, K., Sari, D. L., & Kurniawati, E. (2023). *Mengurai Ancaman: Sekuritisasi melalui Lensa Framing dan Diskursus di Media Sosial*. LPPM UPNVY PRESS.
- Lausberg, H., & Kennedy, G. A. (1998). *Handbook of Literary Rhetoric* (D. E. Orton & R. D. Anderson (Ed.)). BRILL. <https://doi.org/10.1163/9789004663213>
- Liebes, T. (1992). Our war/their war: Comparing the intifadeh and the gulf war on U.S. and Israeli television. *Critical Studies in Mass Communication*, 9(1), 44–55. <https://doi.org/10.1080/15295039209366814>
- Liebes, T. (2001). “Look me straight in the eye” the political discourse of authenticity, spontaneity, and sincerity. *The Communication Review*, 4(4), 499–510. <https://doi.org/10.1080/10714420109359482>
- Liebes, T., & Kampf, Z. (2009). Performance Journalism: The Case of Media’s Coverage of War and Terror. *The Communication Review*, 12(3), 239–249. <https://doi.org/10.1080/10714420903124135>
- Luengo, M., & Ihlebæk, K. A. (2019). Journalism, solidarity and the civil sphere: The case of Charlie Hebdo. *European Journal of Communication*, 34(3), 286–299. <https://doi.org/10.1177/0267323119844411>
- Marchi, R. (2012). With Facebook, Blogs, and Fake News, Teens Reject Journalistic “Objectivity.” *Journal of Communication Inquiry*, 36(3), 246–262. <https://doi.org/10.1177/0196859912458700>
- McIntyre, K. E. (2015). *Constructive journalism: The effects of positive emotions and solution information in news stories*. The University of North Carolina at Chapel Hill.
- Murphy, J. B., Ward, S. J. A., & Donovan, A. (2006). Ethical Ideals in Journalism: Civic Uplift or Telling the Truth? *Journal of Mass Media Ethics*, 21(4), 322–337. https://doi.org/10.1207/s15327728jmme2104_7
- Nohrstedt, S. A., Kaitatzi-Whitlock, S., Ottosen, R., & Riegert, K. (2000). From the Persian Gulf to Kosovo — War Journalism and Propaganda. *European Journal of Communication*, 15(3), 383–404. <https://doi.org/10.1177/0267323100015003007>
- Nossek, H. (2004). Our News and their News. *Journalism*, 5(3), 343–368. <https://doi.org/10.1177/1464884904044941>
- Nugroho, N. P. (2024). *Nilai Tukar Rupiah Melemah, Ini Industri yang Untung dan Buntung*. Tempo.co. <https://bisnis.tempo.co/read/1859219/nilai-tukar-rupiah-melemah-ini-industri-yang-untung-dan-buntung>
- Paré, G., & Kitsiou, S. (2017). Methods for Literature Reviews. In F. Lau & C. Kuziemsky (Ed.), *Handbook of eHealth Evaluation: An Evidence-based Approach*. University of

Victoria.

- Paré, G., Trudel, M.-C., Jaana, M., & Kitsiou, S. (2015). Synthesizing information systems knowledge: A typology of literature reviews. *Information & Management*, 52(2), 183–199. <https://doi.org/10.1016/j.im.2014.08.008>
- Powers, A. (2020). Managing Civility in News and Information Organizations. *Nordic Journal of Media Management*, 1(4). <https://doi.org/10.5278/njmm.2597-0445.6252>
- Reich, Z. (2011). User Comments: The Transformation of Participatory Space. In *Participatory Journalism* (hal. 96–117). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781444340747.ch6>
- Santoso, G., Karim, A. A., Maftuh, B., Sapriya, & Murod, M. (2023). Kajian Dinamika Demokrasi di Indonesia untuk Menjadi Tokoh Pahlawan Daerah dan Nasional RI Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(1), 224–240. <https://doi.org/10.9000/jupetra.v2i1.142>
- Schlesinger, A. M. (2014). *The Vital Center: The Politics of Freedom*. Transaction Publishers.
- Schudson, M. (2001). The objectivity norm in American journalism. *Journalism*, 2(2), 149–170. <https://doi.org/10.1177/146488490100200201>
- Schudson, M. (2003). What's Unusual About Covering Politics as Usual. In *Journalism After September 11* (hal. 54–65). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203218136-9>
- Smith, J. A. (2017). Interpreting Too Little: The New York Times, John W. White, and Biographical Research. *Journalism & Communication Monographs*, 19(3), 237–244. <https://doi.org/10.1177/1522637917719278>
- Springer, N., Engelmann, I., & Pfaffinger, C. (2015). User comments: motives and inhibitors to write and read. *Information, Communication & Society*, 18(7), 798–815. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2014.997268>
- Valenzuela, S., Kim, Y., & Gil de Zuniga, H. (2012). Social Networks that Matter: Exploring the Role of Political Discussion for Online Political Participation. *International Journal of Public Opinion Research*, 24(2), 163–184. <https://doi.org/10.1093/ijpor/edro37>
- Ward, S. J. A. (2005). Philosophical Foundations for Global Journalism Ethics. *Journal of Mass Media Ethics*, 20(1), 3–21. https://doi.org/10.1207/s15327728jmme2001_2
- Ward, S. J. A. (2010). A Theory of Patriotism for Global Journalism. In S. J. A. Ward & H. Wasserman (Ed.), *Media Ethics Beyond Borders*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203853078>
- Wessler, H. (2008). Investigating Deliberativeness Comparatively. *Political Communication*, 25(1), 1–22. <https://doi.org/10.1080/10584600701807752>
- Yesicha, C., & Noviani, R. (2021). KONSTRUKSI KORBAN DALAM FILM DOKUMENTER SEXY KILLERS. *Bricolage : Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 7(2), 313. <https://doi.org/10.30813/bricolage.v7i2.2171>
- Zelizer, B., & Allan, S. (Ed.). (2003). *Journalism After September 11*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203218136>